



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	10
1.4.Manfaat Penelitian	11
1.5.Keaslian Penelitian.....	11
1.6.Ruang Lingkup	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
2.1.Tinjauan Pustaka	14
2.2.Landasan Teori.....	17
2.2.1. Kebijakan Alokasi Lahan Hutan di Indonesia.....	17
2.2.2. Perizinan Sektor Berbasis Lahan Hutan	21
2.2.2.1. Perizinan di Sektor Kehutanan	23
2.2.2.2. Perizinan di Sektor Pertambangan	26
2.2.2.3. Perizinan di Sektor Perkebunan	28
2.2.3. Konsep Politik Birokrasi	31
2.2.4. Kerangka Teori <i>Power</i> dan <i>Actor-Centre Power</i>	32
2.2.4.1. Kerangka Teori <i>Power</i>	32
2.2.4.2. Kerangka Teori <i>Actor Centered Power</i>	35
2.2.5. Pendekatan Ekonomi Politik	39
2.2.5.1. Perkembangan Ilmu Ekonomi Politik	39
2.2.5.2. Interaksi Ekonomi dan Politik.....	45
2.2.5.3. Perilaku Kalap Rente (<i>Rent Seeking Behavior</i>).....	47
2.3.Kerangka Konseptual Penelitian	50



BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Metode Dasar	54
3.2. Lokasi Penelitian	55
3.3. Sampel Penelitian	57
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	58
3.5. Analisis Data	65
3.5.1. Tujuan 1 : Mendapatkan data dan penjelasan tentang dinamika ekonomi dan politik pada sistem perizinan berbasis lahan hutan di Provinsi Riau	66
3.5.2. Tujuan 2 : Mendapatkan data dan penjelasan tentang kontestasi peran dan <i>power</i> oleh aktor yang terlibat dalam proses perizinan berbasis lahan hutan di Provinsi Riau	67
3.5.3. Tujuan 3 : Merekonstruksi strategi menghindarkan praktek “perilaku kalap rente” pada sistem perizinan berbasis lahan hutan di Provinsi Riau	72
BAB IV. DINAMIKA EKONOMI DAN POLITIK PADA SISTEM PERIZINAN BERBASIS LAHAN HUTAN DI PROVINSI RIAU	73
4.1. Konsep Ekonomi Politik Pada Rezim Perizinan Berbasis Lahan Hutan ..	73
4.2. Posisi Negara/Pemerintah Dalam Alokasi Lahan	75
4.2.1. Perizinan Berbasis Lahan Hutan di Riau	79
4.2.2.1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	83
4.2.2.2. Izin Pelepasan Kawasan Hutan	90
4.2.2.3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	97
4.3. Kegiatan Ekonomi Dalam Perizinan Berbasis Lahan Hutan	105
4.3.1. Penerimaan PNBPN Sektor Kehutanan di Indonesia	107
4.3.1.1. Realisasi PSDH, DR di Provinsi Riau	114
4.3.1.2. Penerimaan PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau	119
4.3.2. Kontribusi Sektor Perkebunan Kelapa Sawit	123
4.3.3. Potensi Hilangnya Penerimaan Negara dari Sektor Kehutanan	124
4.3.3.1. Perubahan Kondisi Kawasan Hutan Akibat Perizinan Berbasis Lahan	124
4.3.3.2. Hilangnya Potensi Penerimaan PSDH dan DR	127
4.3.3.3. Potensi Kerugian Negara Akibat Areal Konsesi di Dalam Kawasan Hutan	133
4.4. <i>Rent Seeking Behavior</i> (Perilaku Kalap Rente)	137
4.4.1. <i>Rent Seeking Society</i>	137
4.4.2. <i>Rent Seeking Bureaucrats</i>	145
4.5. Kesimpulan	151
BAB V. KONTESTASI PERAN DAN <i>POWER</i> OLEH AKTOR DALAM PERIZINAN BERBASIS LAHAN HUTAN DI PROVINSI RIAU	153
5.1. Identifikasi Aktor dalam Perizinan Berbasis Lahan Hutan	154



5.1.1 Negara	156
5.1.1.1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	157
5.1.1.2. Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN)	159
5.1.1.3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	159
5.1.1.4. Pemerintah Daerah	159
5.1.2. Perusahaan Swasta	160
5.1.3. Individu	160
5.1.4. Masyarakat	161
5.2. Dinamika Power Aktor dalam Sistem Perizinan di Riau	163
5.2.1. Peran Aktor dan <i>Power</i> dalam Proses Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)	164
5.2.1.1. Penggunaan Sumber Power Koersi	166
5.2.1.2. Penggunaan Sumber Power Dis (Insentif)	168
5.2.1.3. Penggunaan Sumber Power Dominan Informasi	171
5.2.2. Peran Aktor dan Power dalam Proses Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	172
5.2.2.1. Penggunaan Sumber Power Koersi	174
5.2.2.2. Penggunaan Sumber Power Dis (insentif).....	175
5.2.2.3. Penggunaan Sumber Power Dominan Informasi	178
5.2.3. Peran Aktor dan Power dalam Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan	179
5.2.3.1. Penggunaan Sumber Power Koersi	180
5.2.3.2. Penggunaan Sumber Power Dis (insentif).....	181
5.2.3.3. Penggunaan Sumber Power Dominan Informasi	183
5.3. Bentuk Kontestasi Aktor Dalam Perizinan Berbasis Lahan Hutan.....	189
5.3.1. Pertarungan Dalam Birokrasi Pemerintah.....	189
5.3.2. Perbedaan Pandangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .	196
5.4. Kesimpulan	211
 BAB VI. UPAYA DAN STRATEGI MENGHINDARKAN PRAKTEK PERILAKU KALAP RENTE PADA REZIM PERIZINAN BERBASIS LAHAN HUTAN DI PROVINSI RIAU	
6.1. Praktek “Perilaku Kalap Rente” atau Korupsi Birokrasi di Indonesia.....	212
6.2. Faktor Pendorong “Perilaku Kalap Rente” Pada Rezim Perizinan Berbasis Lahan	215
6.2.1. Perilaku Birokrasi.....	215
6.2.2. Pengawasan Belum Optimal	219
6.2.3. Regulasi dan Kelembagaan Belum Efektif	220
6.3. Upaya dan Strategi Mengurangi Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	222
6.3.1. Penguatan Integritas Birokrasi	223
6.3.2. Peningkatan Kualitas Kerja Kelembagaan Perizinan.....	227
6.3.3. Penegakkan Hukum Kehutanan (<i>Forest Law Enforcement</i>) Dalam Perizinan Berbasis Lahan Hutan	236
6.4. Kesimpulan	238



BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN.....	239
7.1. Kesimpulan	239
7.2. Saran.....	241
DAFTAR PUSTAKA	244



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Penelitian terkait dengan alokasi lahan dan dan penggunaan lahan, ekonomi politik, aktor dan kepentingan dalam alokasi dan penggunaan lahan	15
Tabel 2.2. Fungsi Hutan dan Jenis Izin Pemanfaatan yang diberikan	23
Tabel 2.3. Elemen <i>Power</i> , Fakta Lapangan dan Contoh Tindakan.....	38
Tabel 3.1. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Sumber Data Berdasarkan Tujuan dan Output Penelitian	60
Tabel 3.2. Dokumen-Dokumen Sebagai Obyek Telaah.....	63
Tabel 4.1. Perubahan Status Kepemilikan Lahan Menurut Rezim Kepemilikan dalam Sitem Perizinan Berbasis Lahan Hutan di Riau.....	78
Tabel 4.2. Penutupan Lahan Provinsi Riau Tahun 1990 sampai 2017	80
Tabel 4.3. Fungsi Hutan dan Jenis Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	82
Tabel 4.4. Daftar Pemegang IUPHHK-HA Tahun 2017 di Provinsi Riau	83
Tabel 4.5. Daftar Pemegang IUPHHK-HTI di Provinsi Riau s.d. Tahun 2018	87
Tabel 4.6. Daftar Pemegang IPPKH di Provinsi Riau	103
Tabel 4.7. Prosentase Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	112
Tabel 4.8. Prosentase Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan	113
Tabel 4.9. Realisasi Produksi Kayu Hutan Alam dan Hutan Tanaman dari IUPHHK-HTI di Riau Tahun 2010-2014.....	119
Tabel 4.10. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau	121
Tabel 4.11. Asumsi Sebagai Dasar Simulasi Perhitungan Potensi PSDH	129
Tabel 4.12. Asumsi Sebagai Dasar Simulasi Perhitungan Potensi DR.....	130
Tabel 4.13. Selisih Penerimaan PSDH Berdasarkan Hasil Simulasi dan Realisasi Menteri Keuangan.....	131
Tabel 4.14. Selisih Penerimaan DR Berdasarkan Hasil Simulasi dan Realisasi Menteri Keuangan.....	132
Tabel 4.15. Perkebunan Non Prosedural di Kawasan Hutan Riau.....	135
Tabel 4.16. Perusahaan HTI yang memiliki luas konsesi di atas 200.000 Ha	139
Tabel 4.17. Kasus Korupsi Dalam Proses Perizinan Hutan Tanaman di Riau	146
Tabel 4.18. Biaya Pengurusan Izin Usaha Perkebunan.....	148
Tabel 5.1. Aktor/Stakeholder dalam Sistem Perizinan Berbasis Lahan Hutan	155
Tabel 5.2. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Koersi IUPHHK-HTI.	166
Tabel 5.3. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> (dis) Insentif IUPHHK-HTI	168
Tabel 5.4. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Dominan Informasi	171
Tabel 5.5. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Koersi	174
Tabel 5.6. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> (Dis) Insentif	176
Tabel 5.7. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Dominan Informasi	178



Tabel 5.8. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Koersi	181
Tabel 5.9. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> (Dis) Insentif	182
Tabel 5.10. Perhitungan <i>Power</i> aktor : Sumber <i>Power</i> Dominan Informasi ..	183
Tabel 5.11. Rekapitulasi Jenis Aktor, Peran Aktor, dan <i>Power</i> Aktor dalam Sistem Perizinan Berbasis Lahan Hutan di Provinsi Riau.	184
Tabel 5.12. Pembagian Kewenangan Dalam Perizinan Sektor Kehutanan Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014	195
Tabel 5.13. Hasil Usulan Gubernur Riau, Hasil Tim Terpadu dan SK Menhut 673/2014.....	204
Tabel 5.14. Perubahan Luas kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2016.....	207
Tabel 6.1. Perubahan Lingkungan Kerja dan Paradigma Baru.....	224
Tabel 6.2. Substansi Pengaturan dalam PP No.104 Tahun 2015	233



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1. Sistem Ganda dalam Pengaturan Lahan di Indonesia	18
Gambar 2.2. Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan di Indonesia.....	21
Gambar 2.3. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Indonesia	22
Gambar 2.4. Proses Permohonan IUPHHK-HTI (Permenhut No. P.10/Menhut-II/2010).....	24
Gambar 2.5. Proses Permohonan IUPHHK-HTI melalui Lembaga OSS	25
Gambar 2.6. Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	27
Gambar 2.7. Proses Permohonan IPPKH Tanpa Melalui OSS	28
Gambar 2.8. Prosedur Resmi Dalam Mendapatkan Perizinan di Sektor Perkebunan.....	30
Gambar 2.9. Proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan melalui Lembaga OSS	31
Gambar 2.10. Kerangka Konseptual Penelitian	52
Gambar 3.1. Lokasi Penelitian di Provinsi Riau	56
Gambar 4.1. Perubahan Penutupan Lahan Berdasarkan Sektor Berbasis Lahan Tahun 1990 – 2017 di Riau	81
Gambar 4.2. Perbandingan Jumlah IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman di Indonesia	85
Gambar 4.3. Peta Lokasi Perusahaan Pemegang IUPHHK-HTI di Provinsi Riau	89
Gambar 4.4. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Ha) di Indonesia	92
Gambar 4.5. Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Pemegang Pengusahaan di Provinsi Riau.....	93
Gambar 4.6. Perkembangan Luas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan di Riau	94
Gambar 4.7. Kondisi Perizinan Perkebunan di Provinsi Riau	95
Gambar 4.8. Lokasi Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan di Riau	96
Gambar 4.9. Perjalanan Kebijakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Indonesia.....	100
Gambar 4.10. Lokasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Riau	104
Gambar 4.11. Target dan Realisasi PNPB di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	109
Gambar 4.12. Komposisi Penerimaan PNPB Kehutanan	110
Gambar 4.13. Tren PNPB Sektor Kehutanan Tahun 2010-2015	111
Gambar 4.14. Mekanisme Pembagian Dana Perimbangan Pemerintah.....	112
Gambar 4.15. Komposisi Anggaran Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, DBH SDA dan DBH Kehutanan di Provinsi Riau	115
Gambar 4.16. Mekanisme Penetapan Alokasi DBH Kehutanan.....	116



Gambar 4.17. Penerimaan PSDH Sektor Kehutanan di Riau Menurut Data Dinas Kehutanan dan Peraturan Menteri Keuangan.....	118
Gambar 4.18. Penerimaan DR Sektor Kehutanan di Riau Menurut Data Dinas Kehutanan dan Peraturan Menteri Keuangan	118
Gambar 4.19. Tren Perubahan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Riau	125
Gambar 4.20. Perubahan Penutupan Lahan di Areal Konsesi Beberapa Perusahaan Perkebunan Tahun 1990 - 2015	126
Gambar 4.21. Perubahan Penutupan Lahan di Areal Konsesi PT. RAPP di Pulau Padang	127
Gambar 4.22. Hasil Simulasi Perhitungan Potensi Perhitungan PSDH Terhadap Realisasi PSDH Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Riau dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2010-2014.....	131
Gambar 4.23. Hasil Simulasi Perhitungan Potensi Perhitungan DR Terhadap Realisasi DR Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Riau dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tahun 2010-2014.....	132
Gambar 4.24. Perbandingan Produksi Pulp di Provinsi Riau dan Indonesia..	141
Gambar 4.25. Pola Penguasaan Lahan dan Bahan Baku Industri oleh IUPHHK-HTI di Riau	144
Gambar 4.26. Pola Pemungutan <i>Fee</i> Pengurusan IPPKH	150
Gambar 5.1. Luas Lahan dan Jumlah Konflik Lahan di Provinsi Riau	163
Gambar 5.2. Konfigurasi Aktor dan Sumber <i>Power</i> dalam Perizinan Pemanfaatan Hutan Tanaman	165
Gambar 5.3. Konfigurasi Aktor dan Sumber <i>Power</i> dalam Perizinan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Sawit	173
Gambar 5.4. Konfigurasi Aktor dan Sumber <i>Power</i> dalam Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan.....	180
Gambar 5.5. Peta Konflik dalam Sistem Perizinan Berbasis Lahan Hutan di Provinsi Riau.....	193
Gambar 5.6. Istilah Hutan Konversi atau Peruntukan Lainnya di dalam TGHK	198
Gambar 5.7. Perbandingan Luas Kawasan Hutan di Riau 1986 - 2016.....	208
Gambar 6.1. Model Perilaku Birokrasi	215
Gambar 6.2. Usulan Bentuk Kelembagaan Perizinan Online Terpadu.....	236



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 1990	258
Lampiran 2. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 1996	259
Lampiran 3. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2000	260
Lampiran 4. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2003	261
Lampiran 5. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2006	262
Lampiran 6. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2009	263
Lampiran 7. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2012	264
Lampiran 8. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2015	265
Lampiran 9. Penutupan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2017	266
Lampiran 10. Quisioner Untuk Survey Lapangan	267
Lampiran 11. Daftar Informan Untuk Penelitian	269
Lampiran 12. Menghitung nilai Xi dan Di Untuk Perhitungan Power Aktor .	270
Lampiran 13. Penilaian Power Aktor melalui Mekanisme Pemanfaatan Kawasan Hutan IUPHHK-HTI	272
Lampiran 14. Tabel Penilaian Power Aktor Dalam Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	276
Lampiran 15. Tabel Penilaian Power Aktor melalui Mekanisme Pinjam Pakai KH	280



DAFTAR SINGKATAN

AA	: Arara Abadi
ACP	: <i>Actor-Centered Power</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APL	: Areal Penggunaan Lain
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPHP	: Balai Pemantauan Hutan Produksi
BPKH	: Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CPRs	: <i>Common Pool Resources</i>
Dishut	: Dinas Kehutanan
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DR	: Dana Reboisasi
ESDM	: Energi Sumber Daya & Mineral
Gakkum	: Penegakkan Hukum
HGU	: Hak Guna Usaha
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPH-TI	: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HTI	: Hutan Tanaman Industri
ICW	: Indonesian Corruption Watch
IL	: Izin Lokasi
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUP	: Izin Usaha Perkebunan/Pertambangan
IUPHHBK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
IUPHHK-	
HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam
IUPHHK-	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman
HTI	Industri
IUPHHK-	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman
HTR	Rakyat
IUPHKm	: Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
IUPJL	: Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan



IUPK	: Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
KHDTK	: Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
KSDAE	: Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MK	: Mahkamah Konstitusi
OSS	: Online Systeem Submission
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Permentan	: Peraturan Menteri Pertanian
PHPL	: Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PKTL	: Planologi Kehutanan Tata Lingkungan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Negara
RAPP	: Riau Andalan Pulp & Paper
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPPH	: Rencana Pengukuhan dan Penatagunaan Hutan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWP	: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SK	: Surat Keputusan
TGHK	: Tata Guna Hutan Kesepakatan
Timdu	: Tim Terpadu
TMKH	: Tukar Menukar Kawasan Hutan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang Undang Pokok Agraria
WKP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WPP	: Wilayah Pengembangan Parsial